

SUKU BUNGA PERBANKAN MASIH PENGHAMBAT PEMBIAYAAN UMKM INDONESIA

Johnny W. SITUMORANG dan Jannes SITUMORANG^{*)}

Abstrak

Dalam perspektif ilmu ekonomi, suku bunga adalah harga uang, dan secara langsung mempengaruhi investasi (langsung dan portofolio), tabungan, kredit dan risiko, serta aliran modal. Semakin tinggi suku bunga semakin rendah investasi, dan sebaliknya. Dalam dimensi ekonomi makro, pengelolaan suku bunga merupakan tugas utama dari Bank Sentral Indonesia dengan menggunakan kebijakan moneter dan juga instrumen untuk pengendalian inflasi dan nilai tukar. Porsi kredit perbankan untuk UMKM masih sangat rendah dibandingkan perusahaan skala besar yang menunjukkan aksesibilitas UMKM terhadap perbankan masih rendah. Tingkat suku bunga perbankan Indonesia selama ini masih sangat tinggi sementara lembaga perbankan berstatus bank komersial yang mengikuti pergerakan pasar. Kebijakan moneter belum mampu mempengaruhi pasar uang agar tingkat suku bunga komersial rendah. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor penghambat akses UMKM terhadap perbankan dan sistem perbankan sekarang kurang tepat sebagai sumber pembiayaan UMKM. Agar aksesibilitas UMKM semakin tinggi terhadap lembaga perbankan maka sebaiknya perlu ada lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan UMKM.

Suku bunga, Moneter, Perbankan, Kredit, UMKM

I. Pendahuluan

Sumber pembiayaan UMKM berasal dari berbagai lembaga, yakni perbankan dan non perbankan, seperti pasar saham, pemerintah, modal ventura, dan pelepas uang. Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai posisi strategis dalam pembiayaan dunia usaha karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, disamping sebagai lembaga pembiayaan juga penarik uang masyarakat. Perbankan dalam operasionalnya diawasi langsung oleh Bank Indonesia karena menyangkut pada sistem moneter. Kebijakan moneter yang bertujuan mempengaruhi suku bunga, secara langsung, berkaitan dengan perbankan. Apabila otoritas bank sentral sebagai pengemban fungsi moneter mengeluarkan kebijakan kontraksi moneter akan menyebabkan naiknya suku bunga perbankan dan sebaliknya kebijakan ekspansi moneter menurunkan suku bunga perbankan.

Sejarah perbankan Indonesia terlihat dari perjalanan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Orba), otoritas moneter dibawah kendali langsung presiden, sehingga kebijakan moneter dapat menjadi instrumen presiden untuk kepentingan pembiayaan dunia usaha sesuai dengan keinginannya. Sampai akhir tahun 1970-an, sistem moneter Indonesia adalah *fully under-controlled* dengan rezim *fixed interest rate*. Pembiayaan dunia usaha, usaha skala besar (milik pemerintah dan swasta) dan Usaha Kecil

^{*)} DR Johnny W. Situmorang, Peneliti (non-aktif) Kemenneg KUMKM, Associate Professor Institut Asia Perbankan-Kuangan dan Informatika (IAPKI) Perbanas, Jakarta. Ir. Jannes Situmorang, Peneliti Kemenneg KUMKM, Jakarta

dan Menengah (UKM) dengan mudah dapat diterapkan melalui perbankan dengan berbagai fasilitas moneter. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit UMKM, seperti Bimas dan KUT, berjalan dengan suku bunga yang rendah adalah bentuk implementasi kebijakan moneter pemerintah pada waktu itu yang pada umumnya disambut baik oleh berbagai kalangan.

Bagaimana perkembangan suku bunga selama ini, terutama sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, sangat menarik untuk diketahui. Independensi Bank Sentral Indonesia menjadikan lembaga itu sebagai satu-satunya pengendali pasar uang. Dengan mengutip Prof. Romer dari University of Berkeley AS, Situmorang menyatakan bahwa otoritas moneter yang sangat kuat mampu membentuk keseimbangan pasar produk dan pasar uang tanpa kurva LM dengan memperkenalkan kurva Monetary Policy (MP), yang dikenal dengan keseimbangan IS-MP. Tingkat suku bunga yang rendah, dengan ukuran satu digit (di bawah 10%) menjadi target dalam pengelolaan ekonomi makro. Karena kebijakan yang konstruktif yang berhasil mengendalikan pergolakan ekonomi akan menyebabkan sektor riil terganggu. Hal ini tentunya tidak mendukung dunia usaha. Dewasa ini, aksesibilitas dunia usaha terhadap perbankan dalam rangka pembiayaan sangat tergantung pada mekanisme pasar yang sangat kompetitif. Suku bunga masih menjadi penghambat utama UMKM dalam mengakses dana perbankan karena tingkatnya masih sangat tinggi. Tulisan ini mengemukakan bagaimana kredit perbankan masih menjadi penghambat pengembangan UMKM dengan melihat fluktuasi bulanan suku bunga tersebut dengan mencoba menggunakan analisis data berseri berdasarkan tingkat suku bunga aktual dan trend.

II. Kredit Untuk UMKM

Kredit untuk UMKM yang berasal dari perbankan sangat penting dan semestinya menjadi sumber pembiayaan utama UMKM. Betapa pentingnya kredit ini untuk rakyat, oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah meramalkannya pada awal tahun 1940 melalui disertasi Dokornya¹. Dia menyatakan bahwa untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat harus memperhatikan peran usaha rakyat yang umumnya berskala kecil. Dunia usaha ini harus memperoleh perlakuan perbankan yang lebih tepat. Untuk Indonesia, pemikiran Djojohadikusumo menjadi awal pemikiran ilmu pembangunan ekonomi. Ketika era Orba, kredit untuk UMKM salah satu agenda pemerintahan yang sangat penting melalui program pembangunan baik dengan suku bunga rendah maupun subsidi. Namun, pemberian akses pembiayaan ini hanya berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi yang mendukung stabilitas politik kekuasaan sentralistik. Sedangkan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan peran dunia usaha tidak berhasil.

Sejalan dengan perubahan tatanan perekonomian dunia, khususnya trend globalisasi, Pemerintah Orba sejak awal tahun 1980-an, pada saat Prof. Soemarlina menjabat sebagai menteri keuangan, pemerintah menyatakan deregulasi perbankan dan melepas kontrol suku bunga meskipun otoritas moneter masih di bawah presiden. Deregulasi perbankan berdampak sangat luas terhadap perekonomian yang terlihat dari kehadiran lembaga bank swasta yang banyak. Pasar perbankan pada satu sisi sangat bebas dengan suku bunga

¹ Judul disertasinya dalam bahasa Belanda, yakni *Het Volkscredietwezen in de Depressie (1944)* yang diterbitkan oleh LP3ES atas prakarsa M. Dawam rahardjo.

mengambang. Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak 1997 bermula dari krisis perbankan dan keuangan yang pada akhirnya mengubah segala-galanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontrol perbankan sepenuhnya di bawah Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter tanpa bisa dicampuri oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi moneter dan politik Indonesia yang menjatuhkan sistem pemerintahan dan politik sentralistik presiden. Ketika itu, pasar uang menjadi sangat liberal. Tidak ada satu kekuatanpun yang dapat menentukan tingkat suku bunga, kecuali permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral hanya dapat mengeluarkan kebijakan sisi moneter, khususnya penawaran uang, untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Akibatnya, dunia usaha harus mampu mengakses kredit perbankan melalui mekanisme pasar.

Perkembangan suku bunga Indonesia sangat menarik dianalisis, terutama sejak Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Untuk menahan laju inflasi yang melambung sangat tinggi pada tahun 1998-1999, otoritas moneter menggunakan instrumen suku bunga sebagai pengendali inflasi. Dengan kebijakan moneter yang sangat konstruktif, suku bunga pada waktu itu melebihi 50% per tahun. Kebijakan konstruksi moneter tersebut sangat berhasil dan juga sekaligus dapat mengembalikan pamor pemerintah dan otoritas bank sentral dalam pengelolaan ekonomi makro. Bank sentral menggunakan instrumen suku bunga untuk mendukung stabilitas ekonomi makro, khususnya pengendalian inflasi dan kurs. Sejak 2001, sektor perbankan telah mulai pulih dari krisis, sebagai akibat dari program penyehatan perbankan, walaupun suku bunga masih cukup tinggi, mencapai 15% per tahun (Anomim, 2004; Ito, 2004; Nasution, 2004).

Pembiayaan perbankan nasional untuk dunia usaha sejak tahun 2000-2007 sangat tinggi. Pada Tabel 1 terlihat nilai kredit perbankan terus naik, pada tahun 2007 telah mencapai total Rp. 6036.15 triliun atau rata-rata sebesar Rp. 4247.37 triliun per tahun. Tetapi akses pembiayaan perbankan ini masih lebih banyak dinikmati oleh usaha skala besar daripada UMKM, termasuk kredit dari BPR hanya sebesar Rp. 312.09 – Rp. 937.30 triliun atau rata-rata Rp. 839.63 triliun per tahun.

Tabel 1. Perkembangan Kredit Bank Umum, KUK, dan Kredit BPR, Tahun 2000-2007 (Rp. triliun)

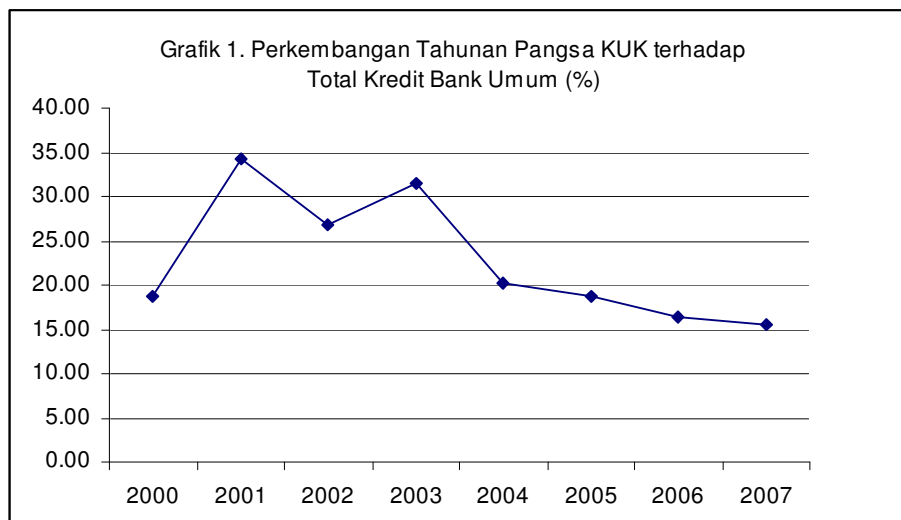
| Uraian | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total Kredit Bank Umum | 1665.23 | 2100.69 | 2771.77 | 3634.28 | 4569.46 | 6048.70 | 7096.69 | 6036.15 |
| Total Kredit KUK dan BPR | 312.09 | 717.61 | 744.15 | 779.54 | 924.75 | 1132.72 | 1168.90 | 937.30 |
| Total Kredit Usaha Kecil | 299.51 | 699.56 | 720.05 | 747.09 | 881.13 | 1076.84 | 1153.48 | 937.30 |
| Total Kredit BPR | 12.58 | 18.05 | 24.10 | 32.45 | 43.62 | 55.88 | 15.42 | |

Sumber: Bank Indonesia 2007; *Sampai September

Perkembangan pangsa kredit KUK sangat fluktuatif pada periode 2000-2007. Pada Grafik 1 terlihat, pangsa kredit KUK terhadap total kredit bank umum berkisar 15-35%. Hal ini berarti porsi kredit bank umum kepada perusahaan skala besar mencapai 65%-85%, sangat jauh berbeda dengan UMKM. Kalau pada tahun 2000, pangsa KUK sebesar 17%, kemudian naik drastis 26-35% pada selang waktu 2001-2003, selanjutnya turun sampai sekitar

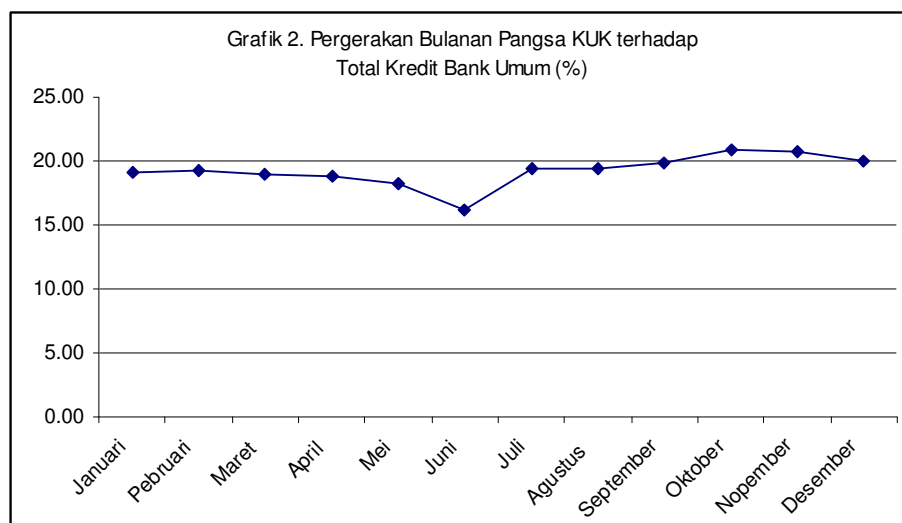
15% pada tahun 2007. Dari grafik tersebut terlihat kecenderungan porsi KUK semakin turun pada periode 2000-2007.

Alokasi kredit untuk UMKM juga menjadi pertanyaan karena besarnya penggunaan kredit untuk konsumsi melalui kartu kredit. Pada umumnya, kredit melalui kartu kredit termasuk dalam kategori KUK. Belakangan ini sangat marak penggunaan fasilitas kartu kredit oleh kalangan menengah-atas. Bahkan perbankan menjadikan kartu kredit sebagai salah satu instrumen bisnis yang memberikan manfaat besar bagi perbankan yang mengeluarkan kartu kredit. Promosi kartu kredit yang sangat tinggi oleh lembaga perbankan salah satu indikator maraknya bisnis ritel perbankan ini sebagai penyalur KUK. Suku bunga tampaknya bukan menjadi penghambat bagi kredit skala kecil untuk konsumsi. Meskipun tingkat suku bunga pembiayaan melalui kartu kredit sangat tinggi, bisa mencapai 3.5% per bulan atau lebih dari 36% per tahun, kartu kredit masih pilihan masyarakat sebagai instrumen pembiayaan konsumsi. Statistik perbankan menyangkut penyaluran KUK yang meningkat tidak menjamin penyaluran kredit untuk UMKM dalam sektor produktif. Gambaran yang lebih riil sebenarnya ditunjukkan oleh statistik kredit oleh BPR karena dana BPR yang disalurkan kepada masyarakat pasti merupakan KUK. Penyaluran kredit BPR kepada masyarakat pada umumnya untuk pembiayaan usaha, terutama sektor perdagangan skala kecil.



Pergerakan bulanan pangsa KUK berbeda dengan perkembangan tahunannya. Pada Grafik 2 terlihat, dengan menggunakan data BI, bahwa pola pergerakan bulanan pangsa KUK terhadap total kredit perbankan menarik untuk disimak. Selama tahun 2000-2007, tingkat alokasi KUK relatif rendah sementara fluktuasi yang paling menonjol adalah pada bulan Juni dan setelah September. Pada setiap bulan Juni, pangsa KUK drop dan setelah bulan September meningkat cukup tinggi. Pangsa bulanan KUK terhadap total kredit bank umum sekitar 16%-21%, di bawah perkembangan tahunannya selama tahun 2000-2007. Pada setiap bulan Januari, pangsa KUK terhadap total kredit bank umum hanya sekitar 19%, dan bergerak dengan porsi yang hampir sama sampai bulan Mei. Kemudian turun drastis menjadi sekitar 16% pada setiap bulan Juni dan selanjutnya naik ke angka 19% pada bulan Juli dan Agustus, pada bulan September naik lagi menjadi 20%. Pada bulan-bulan Oktober dan

Nopember naik lagi sekitar 21% dan pada bulan Desember turun menjadi 20%. Meningkatnya alokasi KUK pada bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember membuktikan bahwa kredit konsumsi sangat berperan dalam sebagai KUK. Aktifitas konsumsi masyarakat pada akhir tahun umumnya lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya.

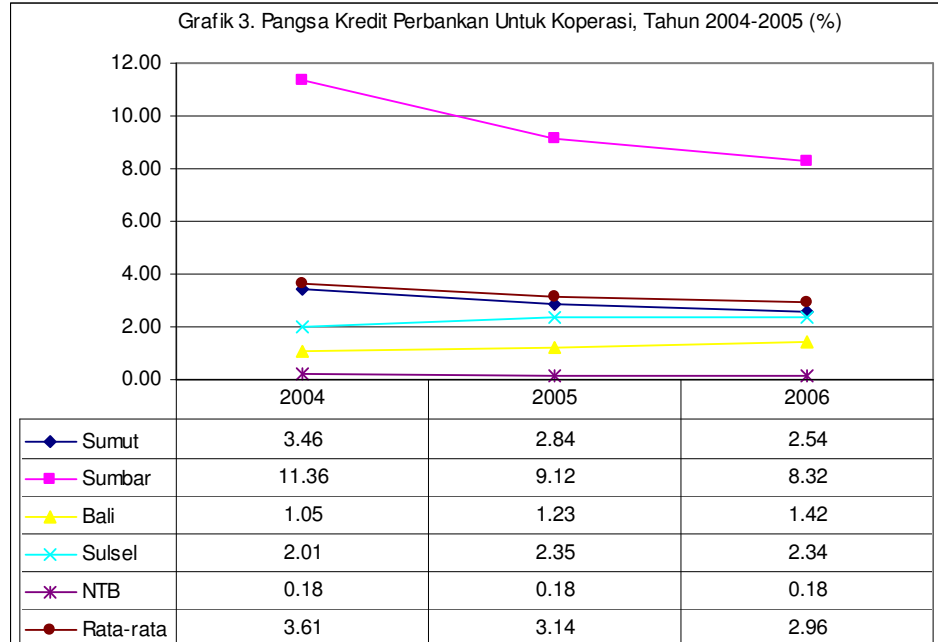


Alokasi kredit perbankan yang rendah juga terlihat pada pembiayaan koperasi. Sebagaimana diketahui, koperasi adalah lembaga usaha masyarakat yang sangat menyatu dengan kehidupan rakyat dalam rangka meningkatkan akses, aktifitas dunia usaha, dan kesejahteraan rakyat. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sah, disamping perusahaan perseroan terbatas (P.T.), di Indonesia. Sebagai badan hukum, kedudukan koperasi dengan P.T. adalah sama. Kalau P.T. memperoleh kredit pembiayaan usaha dari perbankan maka koperasi juga harus bisa memperoleh kredit perbankan. Tapi pembiayaan usaha koperasi dan anggota koperasi yang bersumber dari perbankan masih sangat rendah dan terbatas.

Pada Grafik 3 terlihat porsi kredit perbankan untuk koperasi di lima propinsi, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Bali, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Nusa Tenggara Barat (NTB)². Pada tahun 2004-2006, terlihat porsi kredit perbankan untuk koperasi sangat rendah, tidak sampai 12% dari total kredit di masing-masing propinsi. Berdasarkan kelima propinsi tersebut, rata-rata pangsa kredit perbankan untuk koperasi di bawah 4% dan turun. Kalau pada tahun 2004, rata-rata porsinya masih sebesar 3.61%, pada tahun 2005 turun menjadi 3.14%, dan turun lagi pada tahun 2006 menjadi 2.96%. Porsi kredit perbankan untuk koperasi tertinggi adalah di Sumbar, itupun cenderung turun sepanjang 2004-2006. Kalau pada tahun 2004 porsinya mencapai 11.36% namun kemudian turun menjadi 9.12% pada tahun 2005, dan turun lagi menjadi 8.32% pada tahun 2006. NTB memperoleh alokasi kredit perbankan untuk koperasi terendah, hanya 0.18% dari total kredit perbankan di propinsi itu. Sedangkan di Sumut, Bali, dan Sulsel, merupakan propinsi yang

² Diambil dari sebagian kecil data Survey Peningkatan Daerah Dalam Pembangunan Koperasi. Deputi Pengkajian Bidang Sumberdaya KUMKM, Kementerian Negara KUMKM, tahun 2007 dimana Penulis I sebagai advisor studi tersebut.

memperoleh alokasi kredit perbankan untuk koperasi di bawah 4% selama tahun 2004-2006. Bahkan di Sumut, persinya semakin turun selama periode tersebut.



Memperhatikan perkembangan porsi KUK tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa porsi terbesar alokasi kredit perbankan adalah untuk usaha skala besar. Kemampuan menyerap kredit perbankan oleh perusahaan besar jauh lebih tinggi daripada UMKM. Aksesibilitas usaha skala besar terhadap dana perbankan seolah-olah tidak mempersoalkan tingkat suku bunga perbankan. Sementara aksesibilitas UMKM terhadap kredit perbankan terhambat oleh faktor suku bunga. Apabila ditambah dengan faktor penghambat lainnya maka UMKM semakin jauh dari jangkauan bank komersial untuk pembiayaan usaha UMKM. Sesungguhnya, ketimpangan ini sudah menjadi krusial dalam pengembangan dunia usaha rakyat. Perbedaan ini dapat dipandang sebagai ketidakadilan karena mestinya ekonomi rakyat yang diwakili oleh UMKM semestinya memperoleh porsi yang lebih besar daripada usaha besar. Keadaan ini juga menunjukkan tidak match-nya strategi besar pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang dikenal sebagai triple track dengan praktek, terutama strategi menggerakkan sektor riil dan ekonomi pedesaan.

III. Pergerakan Suku bunga

Suku bunga merupakan harga dari uang, sehingga suku bunga menjadi indikator pasar uang dan menjadi benchmarking tingkat diskonto uang (Branson & Litvack, 1981; Glahe, 1977). Keseimbangan dan stabilitas ekonomi makro yang menjadi arah kebijakan ekonomi memasukkan suku bunga sebagai faktor endogenous dari sisi keseimbangan pasar produk, suku bunga secara langsung mempengaruhi investasi dan dari sisi keseimbangan pasar uang menjadi harga uang dan menentukan permintaan uang spekulatif. Dari ekonomi mikro, suku bunga juga menjadi faktor penentu portofolio, tingkat

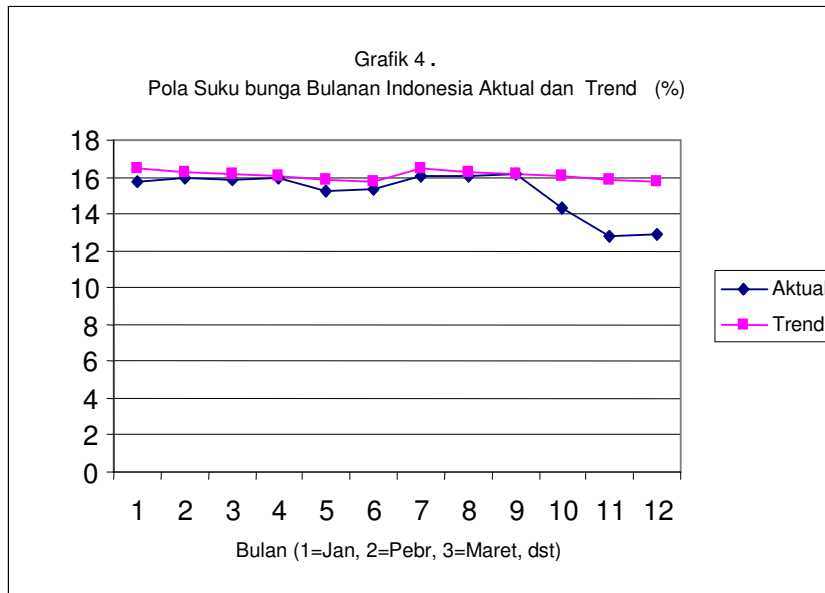
pengembalian kredit, ukuran kelayakan suatu proyek, dan menjadi benchmarking tingkat diskonto. Suku bunga juga menjadi faktor menentukan aliran valuta masuk atau keluar Indonesia. Perusahaan juga menggunakan suku bunga sebagai pembanding kemampuan menciptakan laba. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan lebih tinggi daripada tingkat suku bunga maka perusahaan mempunyai performa dan prospek yang baik. Sebaliknya, kalau profitabilitas lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga, performa perusahaan dan prospeknya kurang baik.

Pergerakan aktual berbeda dengan trend suku bunga dimana trend secara linear semakin menurun dengan kemiringan yang landai sementara aktualnya lebih fluktuatif (Grafik 4). Dengan menggunakan rata-rata bulanan, Situmorang (2007) mengungkapkan pergerakan pola aktual suku bunga hampir mirip dengan pola trendnya. Suku bunga aktual adalah suku bunga yang terjadi di pasar sedangkan suku bunga trend adalah kecenderungan yang terjadi dari sekumpulan data aktualnya. Suku bunga trend merupakan suku bunga potensial³. Pergerakan bulanan suku bunga aktual sebesar 14%-16% dengan rata-rata suku bunga aktual adalah 15.20% sedangkan trend bergerak pada 15%-16% dengan rata-rata bulanan sebesar 16.10%, jauh di atas aktualnya. Tingkat suku bunga aktual di atas nilai rata-ratanya terjadi pada bulan-bulan Januari sampai September. Sedangkan pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember tingkat suku bunga aktual di bawah rata-rata tahunan. Trend suku bunga adalah 15%-16% yang terjadi pada bulan-bulan Januari, Pebruari, Maret, dan April, serta Juli, Agustus, September, dan Oktober. Suku bunga aktual selalu di bawah trend kecuali pada bulan September aktual sama dengan trend. Sesuatu yang menarik terlihat pada kuartal akhir setiap tahunnya, pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember, suku bunga turun drastis dari 16% menuju angka sekitar 13%.

Perbedaan yang sangat mencolok antara aktual dan trend terjadi pada bulan-bulan Oktober, Nopember, dan Desember. Trend suku bunga dapat dinyatakan sebagai nilai potensial yang merupakan kemungkinan tingkat suku bunga yang dapat dicapai pada non-utilisasi sumberdaya secara penuh dan dukungan lingkungan yang kurang baik. Tingkat aktual yang lebih baik dari trend menunjukkan adanya faktor lain, selain dari faktor ekonomi dan musim yang menunjang pencapaian suku bunga aktual itu, khususnya terjadi pada Oktober, Nopember, dan Desember. Secara umum terlihat, pola pergerakan suku bunga aktual yang fluktuatif pada Grafik 3 akibat pengaruh lingkungan bisnis dan perekonomian yang tidak stabil dan kondusif. Tingginya suku bunga aktual pada bulan-bulan Agustus dan September karena pengaruh siklus dan random dimana faktor siklus dan random tinggi pada bulan-bulan Agustus dan September. Kondisi perekonomian dan bisnis pada masa itu menurun disertai oleh faktor acak akibat kondisi alam yang kurang baik. Pada bulan Nopember dan Desember, suku bunga aktual menurun dengan lingkungan ekonomi dan bisnis relatif membaik pada Nopember. Walaupun faktor musim kurang baik pada Nopember dan faktor-faktor siklus dan random pada Desember, ternyata suku bunga aktual turun dan bahkan jauh di bawah nilai potensialnya. Oleh karena itu upaya penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia pada bulan-bulan

³ Suku bunga trend dibangun dari model regresi sederhana berdasarkan data aktual bulanan selama tahun 1997-2006 yang bersumber dari BI.

tersebut sangat tepat sebagai alat untuk mendorong perekonomian yang lebih luas.



Dari pergerakan pola aktual dan trend suku bunga kredit perbankan tersebut hal yang menarik adalah tingkat suku bunga kredit masih cukup tinggi. Pada tingkat suku bunga 14%-16%, UMKM tidak akan mungkin mampu menggunakan dana perbankan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Untuk bisa mengakses dana perbankan, UMKM harus produktif dengan tingkat profitabilitas lebih dari 16%. Tingkat produktifitas seperti itu sangat sulit dicapai oleh UMKM. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara usaha skala besar dengan UMKM dalam menghadapi pasar. Struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan besar cenderung kompetisi monopolistik. Struktur pasar seperti itu akan memberikan peluang lebih besar kepada perusahaan untuk memperoleh laba yang relatif besar. Tingkat profitabilitas perusahaan besar sangat tinggi, bisa melebihi 20%. Sedangkan struktur pasar yang dihadapi oleh UMKM lebih pada persaingan. Pada kondisi pasar persaingan, perusahaan cenderung pada normal profit sehingga akumulasi kapital UMKM sangat rendah. Untuk mencapai profitabilitas UMKM 10% saja sudah cukup memadai. Oleh karena itu agar profitabilitas UMKM dapat menciptakan kemampuan ekspansi, tingkat suku bunga harus sangat rendah, di bawah 6% per tahun.

Faktor suku bunga sebagai hambatan UMKM mengakses dana perbankan terlihat dari alokasi KUK. Kalau disandingkan pola pergerakan kredit KUK pada Grafik 2 dan pola pergerakan suku bunga pada Gambar 4 terlihat konsistensinya. Pada pola pergerakan trend dan tingkat suku bunga yang terjadi pada bulan-bulan Januari sampai September, pada Grafik 2, terlihat porsi KUK terhadap total kredit bank umum selalu di bawah 20%, selebihnya porsi usaha skala besar. Ketika suku bunga turun pada bulan-bulan Oktober sampai Desember maka porsi KUK terhadap total kredit perbankan naik, menjadi di atas 20%.

Dalam rangka pengembangan peran UMKM ke depan, membiarkan bank umum sebagai lembaga perkreditan UMKM tidak akan mampu mengangkat posisi UMKM karena tingkat suku bunga akan sulit mencapai angka di bawah 6% per tahun. Perlakuan khusus terhadap UMKM sangat perlu dan hal itu akan dapat dilakukan sepanjang tersedianya lembaga perbankan yang khusus melayani UMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah. Berbagai negara, seperti Thailand dan Jepang, telah mampu mengangkat peran UMKM karena tersedianya bank khusus untuk UMKM sehingga sektor riilnya berkembang baik. Lembaga perbankan khusus untuk UMKM sekaligus dapat menghilangkan hambatan UMKM selain dari faktor suku bunga dalam mengakses dana perbankan. Sebagai bank umum, semua bank beroperasi di bawah UU perbankan yang mengatur bank sebagai lembaga komersial. Oleh karena itu, lembaga perbankan komersial tidak mungkin memberikan perlakuan khusus terhadap UMKM dengan cara penerapan suku bunga rendah, kecuali adanya kebijakan moneter yang sangat ekspansif dan subsidi dari pemerintah. Kebijakan moneter ekspansif sangat tergantung pada perkembangan ekonomi makro, khususnya menyangkut pengendalian inflasi. Sedangkan subsidi suku bunga tidak menjadi pilihan lagi setelah terjadi reformasi tatanegara dan pemerintahan. Bahkan program pemerintah lebih cenderung menghilangkan segala macam bentuk subsidi kepada rakyat.

IV. Penutup

Tingkat suku bunga perbankan Indonesia masih sangat tinggi. Bagi UMKM, tingginya suku bunga menjadi penghambat aksesibilitas UMKM untuk pembiayaan yang bersumber dari perbankan. Akibatnya pangsa KUK masih sangat rendah. Tingkat suku bunga bulanan Indonesia berpotensi untuk mencapai tingkat yang lebih rendah sepanjang tahun. Tetapi, pencapaian tingkat suku bunga yang rendah tidak hanya tergantung pada sektor moneter juga non-moneter, yakni fiskal dan iklim perekonomian.

Pola pergerakan suku bunga aktual bulanan Indonesia adalah fluktuatif. Tingkat suku bunga aktual tinggi terjadi pada bulan-bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan tingkat rendahnya terjadi pada bulan-bulan Mei, Juni, Oktober, Nopember, dan Desember. Tingkat suku bunga terendah terjadi pada bulan-bulan Oktober, Nopember, dan Desember. Sedangkan tingkat suku bunga trend cenderung menurun sepanjang bulan.

Implikasi kebijakan dari pola pergerakan suku bunga bulanan ini terutama dalam bidang moneter. Tingkat suku bunga masih dapat diturunkan sampai satu digit dengan kebijakan ekspansi moneter apabila otoritas moneter lebih memilih kebijakan yang bias terhadap UMKM untuk mendorong sektor riil.

Lembaga perbankan Indonesia sangat orientasi pada kegiatan komersial sesuai dengan UU perbankan sehingga turunnya tingkat suku bunga perbankan akan sulit terjadi sementara pemerintah tidak mungkin memberikan fasilitas subsidi suku bunga. Oleh karena itu, lembaga perbankan yang khusus melayani UMKM perlu ada agar mampu memberikan akses lebih luas terhadap UMKM. Kementerian Negara KUKM yang menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab mengembangkan peran UMKM harus mampu

mengusahakan jalan terobosan untuk pembiayaan UMKM dan juga harus mampu mewujudkan lembaga perbankan khusus membiayai UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2004). Proceeding of Tokyo Seminar on Indonesia 2004. Indonesia-Japan Economic Cooperation Working Group Team and JICA. Tokyo, August 25-26.
- _____, (2004). Message from Tokyo Seminar on Indonesia 2004. *Policy Option for the Government of Indonesia*. Presented by Indonesia-Japan Economic Cooperation Working Group Team and JICA.
- _____, (2006). *Statistik Suku Bunga Perbankan*. Website BI: www.bi.go.id. Jakarta.
- Branson, William H and James M. Litvack, (1981). *Macroeconomics*. Harper & Row Publishers. NY.
- Djojohadikusomo, Sumitro, (1989). *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. LP3ES. Jakarta.
- Glahe, Fred R., (1977). *Macroeconomics: Theory and Policy*. Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich Inc. NY-Chicago-San Fransisco-Atlanta.
- Ito, Takatoshi, (2004). *Recent Macroeconomic Developments and Challenges Ahead*. The University of Tokyo, Graduate School of Economics and Research Center for Advance Science and Technology. August.
- Makridakis, Spyros and Steven C. Wheelwright, (1989). *Forecasting Methods for Management*. Fifth Edition, Wiley.
- Nasution, Anwar, (2004). *Indonesia Economy Under President DR Susilo Bambang Yudhoyono*. ISEAS-UI, Singapore, 18th October.
- Situmorang, Johnny W., (2007). *Fluktuasi Bulanan Suku Bunga Indonesia Tahun 1997-2006: Analisis Dengan Metode Dekomposisi*. CBES-Moneter Issue Paper.